



LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN (*AUDITED*)

UNIT PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2024



JL. HR RASUNA SAID KAV 4-9 BLOK X-5
KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12950

 <https://upk.kemkes.go.id>



KATA PENGANTAR



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Unit Pelayanan Kesehatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2023 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 2 Mei 2025,
Plt. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M
NIP 198403232009122003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	v
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	2
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	4
II. NERACA	5
III. LAPORAN OPERASIONAL	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
A. PENJELASAN UMUM	9
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	20
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	28
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	30
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	43
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	46

DAFTAR TABEL

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	4
II. NERACA	5
III. LAPORAN OPERASIONAL	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
Tabel A.1 Kategori penyisihan piutang tak tertagih	13
Tabel A.2 Masa Manfaat Aset Tetap	16
Tabel A.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	17
Tabel B Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi.....	20
Tabel B.1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....	21
Tabel. B.2 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja.....	22
Tabel. B.2.1 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023.....	23
Tabel.B.3 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023	24
Tabel. B.4 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023	25
Tabel. B.4.1 Belanja Barang Untuk Penanganan COVID-19	26
Tabel. B.5 Realisasi Belanja Modal	27
Tabel. B.5.1 Perbandingan Belanja Modal Peralatan & Mesin TA 2024 dan 2023	28
Tabel. B.5.1 Rincian Pembelian Belanja Modal TA 2024 & 2023.....	28
Tabel. C.1.1 Rincian Kas di Bendahara Penerima	30
Tabel. C.1.2 Rincian Piutang PNPB.....	31
Tabel. C.1.3 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak...31	
Tabel. C.1.4 Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto) TA 2024 dan 2023.....	32
Tabel C.1.5 Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023.....	32
Tabel. C.2.1 Tabel Mutasi Peralatan dan Medis	33
Tabel. C.3.1 Perbandingan Beban Persediaan Tahunan TA 2024 dan 2023	35
Tabel D.1 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023	36
Tabel D.2 Perbandingan Beban Pegawai TA 2024 dan TA 2023	37
Tabel D.3 Perbandingan Beban Persediaan TA 2024 dan TA 2023.....	38
Tabel D.4 Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023	39
Tabel. D.4.1 Rincian Beban Barang dan Jasa Penanganan Pandemi Covid-19.....	39
Tabel. D.5 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023	40
Tabel. D.6 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023.....	41
Tabel. D.7 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan TA 2023.....	41
Tabel. D.10 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA 2023.....	42

Tabel. E.5 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	45
Tabel. E.5.2 Rincian Transfer Masuk	45
Tabel. E.5.2 Rincian Transfer Keluar	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik B.1 Komposisi Anggaran dan Realisasi dan Realisasi Belanja TA 202424

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan TA 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahunan TA 2024 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2 Mei 2025

Plt. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M
NIP 198403232009122003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan - LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Nilai Pendapatan PNPB dan Realisasi Belanja Unit Pelayanan Kesehatan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp660.473.171,00 atau mencapai 147,07 persen dari target alokasi pendapatan sebesar Rp449.078.000,00 dan realisasi belanja Rp16.053.307.848,00 atau mencapai 98,01 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp16.379.405.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.678.458.154,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.144.576.555,00; Aset Tetap sebesar Rp3.350.024.019,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp6.415.625,00. Kemudian nilai Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp5.681.016.199,00 dengan rincian nilai Kewajiban adalah sebesar Rp0,00 dan Ekuitas adalah sebesar Rp5.681.016.199,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp665.068.271,00 lalu jumlah

beban operasional adalah sebesar Rp14.547.840.539,00. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Lainnya adalah sebesar Rp(13.882.772.268,00). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(7.279.498,00). Surplus/Defisit dari Pos-Pos Luar Biasa adalah sebesar Rp0,00 dan surplus/defisit-LO adalah sebesar (Rp13.890.051.766,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal sebesar Rp4.199.577.470,00 dikurangi Surplus/Defisit - LO sebesar (Rp13.890.051.766,00) kemudian ditambah dengan Koreksi yang menambah / mengurangi ekuitas sebesar Rp7.328,00 ditambahkan dengan transaksi antar entitas Rp15.371.483.167,00 sedangkan untuk kenaikan/penurunan ekuitas Rp1.481.438.729,00 Sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp5.681.016.199,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode Tahunan yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Tahunan untuk TA 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNIT PELAYANAN KESEHATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024		REALISASI DI	%	2023
		ANGGARAN	REALISASI	ATAS (BAWAH) ANGGARAN		REALISASI
1		2	3	4		3
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
1. PENERIMAAN NEGARA						
a. Penerimaan Perpajakan		-	-	-		-
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	449.078.000	660.473.171	211.395.171	147	617.411.618
2. HIBAH		-	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		449.078.000	660.473.171	211.395.171	147	617.411.618
BELANJA NEGARA						
Rupiah Murni						
Belanja Pegawai	B.3	6.802.984.000	6.551.127.718	(251.856.282)	96	6.104.310.750
Belanja Barang	B.4	6.916.369.000	6.842.534.130	(73.834.870)	99	7.687.826.955
Belanja Modal	B.5	2.660.052.000	2.659.646.000	(406.000)	100	331.450.000
JUMLAH BELANJA		16.379.405.000	16.053.307.848	(326.097.152)	98	14.123.587.705



Jakarta, 2 Mei 2025
Plt. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan

Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M
NIP 198403232009122003

II. NERACA

**UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

NAMA PENARIKAN	Ref	JUMLAH		KENAIKAN (Penurunan)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
ASET					
ASET LANCAR	C.1				
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	6.057.800	1.465.600	4.592.200	313.33
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3	(30.290)	(7.328)	(22.962)	313.35
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.4	6.027.510	1.458.272	4.569.238	313.33
Persediaan	C.1.5	2.138.549.045	1.827.657.120	310.891.925	17.01
JUMLAH ASET LANCAR		2.144.576.555	1.829.115.392	(315.461.163)	(17,25)
ASET TETAP	C.2				
Peralatan dan Mesin	C.2.1	25.735.964.174	25.235.752.022	500.212.152	(6,57)
Akumulasi Penyusutan	C.2.2	(22.205.940.155)	(22.931.871.194)	725.931.039	(1,18)
JUMLAH ASET TETAP		3.530.024.019	2.303.880.828	1.226.143.191	(39,45)
ASET LAINNYA	C.3				
Aset Tak Berwujud	C.3.1	1.001.960.000	1.001.960.000	-	-
Aset Lain-lain	C.3.2	2.576.738.897	417.305.049	2.159.433.848	517.47
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(3.572.283.272)	(1.352.683.799)	(2.219.599.473)	164.09
JUMLAH ASET LAINNYA		6.415.625	66.581.250	(60.165.625)	(90,36)
JUMLAH ASET		5.681.016.199	4.199.577.470	(4.81.438.729)	35,28
EKUITAS					
Ekuitas	C.4	5.681.016.199	4.199.577.470	1.481.438.729	35.28
JUMLAH EKUITAS		5.681.016.199	4.199.577.470	1.481.438.729	35,28
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.681.016.199	4.199.577.470	1.481.438.729	35,28

Jakarta, 2 Mei 2025

Plt. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M
NIP:198403232009122003

III. LAPORAN OPERASIONAL

UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	JUMLAH	
		2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		665.068.271	610.462.829
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	665.068.271	610.462.829
PENDAPATAN HIBAH			
Pendapatan Hibah		-	-
Jumlah Pendapatan Hibah		-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		(665.068.271)	(610.462.829)
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	6.551.127.718	6.104.310.750
Beban Persediaan	D.3	2.567.997.443	2.693.380.758
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.498.484.803	1.824.908.647
Beban Pemeliharaan	D.5	1.452.127.401	1.028.282.920
Beban Perjalanan Dinas	D.6	984.404.450	2.452.028.396
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Hibah		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.493.668.434	1.842.533.454
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	17.435	7.328
Beban Lain-Lain		-	-
JUMLAH BEBAN		(14.547.827.684)	(15.946.050.930)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		13.822.722.268	15.335.588.101

URAIAN	CAT	JUMLAH	
		2023	2023
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.9	-	6.113.789
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	(6.113.789)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.10	(7.279.498)	(15.341.092)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(7.279.498)	(15.341.092)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		(7.279.498)	(9.227.303)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		13.890.051.766	15.344.815.404
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.10	13.890.051.766	15.344.815.404

Jakarta, 2 Mei 2025
 Plt. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M
 NIP 198403232009122003

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	Jumlah	
		2024	2023
1		2	2
Ekuitas Awal	E.1	4.199.577.470	6.084.355.308
Surplus/Defisit – Lo	E.2	(13.890.051.766)	(15.344.815.404)
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi	E.3	7.328	(73.121.361)
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi Atas Relaksifikasi		-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.1	-	(73.125.000)
Lain-Lain	E.3.2	7.328	3.639
Transaksi Antar Entitas	E.4	15.371.483.167	13.533.158.927
Kenaikan / Penurunan Ekuitas		1.481.438.729	(1.884.777.838)
Ekuitas Akhir	E.5	5.681.016.199	4.199.577.470

Jakarta, 2 Mei 2025
Plt. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan

Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M
NIP 198403232009122003

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELESAAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Unit Pelayanan Kesehatan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No.2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan HR.Rasuna Said Blok X5 Kav.4-9 Kuningan, Jakarta Selatan.

Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes berkomitmen dengan visi *“Menjadi Klinik Utama Percontohan Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Terbaik Bagi Karyawan Dan Masyarakat Umum”* Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang professional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, Konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Pendapatan-LO (2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut Klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi asset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan /Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.1
Kategori penyisihan piutang tak tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel A.2
Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak

Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Indri)

Selama periode berjalan, Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel B.1
Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024

URAIAN	2024	
	ANGGARAN/ ESTIMASI PENDAPATAN AWAL	ANGGARAN/ ESTIMASI PENDAPATAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	449.078.000	660.473.171
Jumlah Pendapatan	449.078.000	660.473.171
Belanja		
Belanja Pegawai	6.481.389.000	6.802.984.000
Belanja Barang	4.635.481.000	6.557.107.000
Belanja Modal	52.690.000	2.660.052.000
Jumlah Belanja	11.169.560.000	16.020.143.000

Untuk Laporan Keuangan tahun anggaran 2024, Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes telah melakukan 15 kali revisi anggaran. Hal tersebut dilakukan karena adanya buka blokir anggaran sewa kendaraan, blokir anggaran perjalanan dinas berdasarkan instruksi Menteri Keuangan melalui surat Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA Tahun 2024 Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024, penambahan gaji dalam rangka kenaikan gaji berkala, pembelian alat kesehatan (belanja modal) dan penyesuaian pelaksanaan anggaran sehingga realisasi anggaran dapat dilaksanakan dengan optimal.

*Realisasi
Pendapatan
Rp660.473.171,00*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp660.473.171,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp449.078.000,00. Pendapatan Unit Pelayanan

Kesehatan Kemenkes RI terdiri dari pendapatan fungsional umum dan fungsional khusus, pendapatan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: Pendapatan fungsional khusus: Pendapatan dari BPJS kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan.

Tabel B.2
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024

Akun	Uraian	2024		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	361.328.000	554.957.271	153,59
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)	6.000.000	27.888.900	464,82
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	81.750.000	77.627.000	94,96
	Jumlah	449.078.000	660.473.171	147,07

Sedangkan untuk rincian perbandingan realiasi pendapatan 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel B.2.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023

Akun	Keterangan	Tahun Anggaran		Naik (Turun) %
		2024	2023	
Pendapatan Fungsional Umum				
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	0	76.715	(100)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6.113.789	(100)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	181.337	(100)
Pendapatan Fungsional Khusus				
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	554.957.271	499.711.677	10
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)	27.888.900	17.070.100	39
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	77.627.000	94.258.000	(21)

	Jumlah Total	660.473.171	617.411.618	7
--	---------------------	--------------------	--------------------	----------

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 43.061.553,00 atau 7% dibandingkan 31 Desember 2023. Kenaikan realisasi pendapatan antara lain disebabkan oleh:

- . Bertambahnya jumlah kepesertaan BPJS pada klinik pratama, sehingga dapat menambah jumlah dana kapitasi di Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes.
- . Bertambahnya jumlah peserta BPJS yang dirujuk ke klinik utama bakti husada sehingga jumlah klaim meningkat.

Realisasi Belanja

Rp16.053.307.848,00

B.2. Belanja

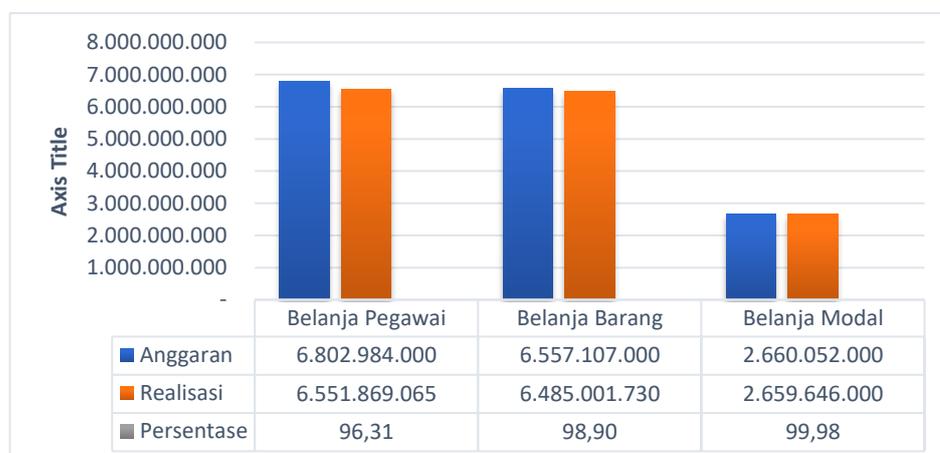
Realisasi Belanja Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 16.053.307.848,00 atau 98.01% dari Anggaran Belanja sebesar Rp. 16.379.405.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan jenis belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel B.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024

URAIAN	TA 2024		Naik Turun (%)
	ANGGARAN	REALISASI	
BELANJA			
Belanja Pegawai	6.802.984.000	6.551.869.065	96,31
Belanja Barang	6.557.107.000	6.485.001.730	98,90
Belanja Modal	2.660.052.000	2.659.646.000	99,98
Jumlah	16.020.143.000	15.696.516.795	97,98

Komposisi Anggaran dan Realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik B.1
Komposisi Anggaran dan Realisasi dan Realisasi Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024



Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp14.123.587.705,00 dan Rp. 15.701.182.742,00. Rincian perbandingan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel B.3.1
Perbandingan Realisasi Belanja
Untuk Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

URAIAN	2024		2023		Naik Turun (%)
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
BELANJA					
1. Belanja Pegawai	6.802.984.000	6.551.869.065	6.390.739.000	6.104.310.750	6,83
2. Belanja Barang	6.557.107.000	6.485.001.730	7.843.357.000	7.687.826.955	(18,55)
3. Belanja Modal	2.660.052.000	2.659.646.000	331.470.000	331.450.000	87,5
Jumlah Belanja	16.020.143.000	15.696.516.795	14.565.566.000	14.123.587.705	10,02

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp (1.572.929.090) atau 10,02 % dibandingkan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI mendapatkan penambahan anggaran untuk belanja modal berupa satu unit ekokardiografi yang digunakan di poli jantung.

Belanja Pegawai
Rp6.551.869.065,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp6.551.869,00 dan Rp6.104.310.750,00. Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel B.4
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023

AKUN	URAIAN	JUMLAH		NAIK
		2024	2023	(TURUN) %
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.795.640.000	1.729.614.300	4
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.140	22.312	8
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	120.372.440	111.827.480	8
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	32.040.470	29.646.012	8
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	15.660.000	61
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	252.670.000	267.900.000	(6)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	24.423.901	14.643.982	67
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	87.555.780	87.266.100	0
511129	Belanja Uang Makan PNS	238.083.000	242.676.000	(2)
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	27.600.000	27.600.000	-
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	5.109.850	8.970.000	(43)
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	182.360.800	41.531.000	-
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.761	1.113	-
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	9.266.000	1.483.250	-
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.596.912	-	-
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	23.760.000	5.400.000	-
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.255.880	1.375.980	-
511628	Belanja Uang Makan PPPK	28.668.000	7.992.000	-
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	-	-	-
512211	Belanja Uang Lembur	263.538.000	122.625.000	115
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	31.899.000	3.804.000	-
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3.128.990.961	3.321.548.422	(6)
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	264.068.823	62.723.799	-
	JUMLAH TOTAL	6.551.127.718	6.104.310.750	7

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. (446.816.968,00) atau (7 %) dibandingkan 31 Desember 2023. Kenaikan realisasi belanja pegawai dikarenakan adanya pegawai PPPK yang bertambah. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kenaikan belanja pegawai khususnya gaji pokok dan tunjangan kinerja.

Belanja Barang
Rp6.842.534.130,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp6.842.534.130,00 dan Rp7.687.826.955,00. Rincian perbandingan realisasi belanja barang adalah sebagai berikut:

Tabel B.5
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

AKUN	URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	646.796.085,	732.229.861,	(12)
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	173.810.682,	175.391.877,	(1)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	96.040.000,	155.512.000,	(38)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	261.713.036,	327.616.045,	(20)
521211	Belanja Bahan	54.190.400,	107.047.500,	(49)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.976.692.008,	2.453.077.591,	21
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	21.611.700,	29.554.860,	(27)
522141	Belanja Sewa	39.000.000,	80.280.000,	(51)
522151	Belanja Jasa Profesi	50.400.000,	101.700.000,	(50)
522191	Belanja Jasa Lainnya	154.920.000,	98.092.000,	58
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.270.470.769,	957.812.321,	33
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	112.485.000,	0,	100
524111	Belanja Perjalanan Biasa	561.998.450,	563.857.266,	(0)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.290.000,	189.810.000,	(21)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.430.000,	267.540.000,	(90)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	244.686.000,	1.430.821.130,	(83)
	Jumlah Belanja Barang	6.842.534.130,	7.670.342.451,	(11)

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(827.808.321,00) atau (11%) dibandingkan 31 Desember 2023. Penurunan realisasi belanja barang dikarenakan tidak adanya lagi belanja barang terkait dengan penanganan Covid-19 pada tahun 2024 serta adanya penurunan anggaran perjalanan dinas sehingga hal tersebut mempengaruhi turunnya realisasi belanja barang pada tahun 2024.

Belanja Modal
Rp2.659.646.000,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi belanja modal lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.659.646.000,00 dan Rp331.450.000,00. Rincian perbandingan belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel B.6
Realisasi Belanja Modal
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023

Akun	URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.659.646.000	227.950.000	1.067
536111	Belanja Modal Lainnya	-	103.500.000	(100)
	Jumlah Belanja	2.659.646.000	331.450.000	702

Realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp(2.328.196.000,00) atau 702 % dibanding 31 Desember 2023. Kenaikan realiasi belanja modal dikarenakan pada tahun 2024 ada pembelian satu unit ekokardiografi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di poli jantung.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp2.659.646.000,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp2.659.646.000,00 dan Rp227.950.000,00. Rincian perbandingan realisasi belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel B.6.1
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023

Akun	URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.659.646.000	227.950.000	1.067
	Jumlah Belanja	2.659.646.000	227.950.000	1.067

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp(2.431.696.000,00) atau 1.067 % dibandingkan TA 2023. Kenaikan tersebut disebabkan karena pada TA 2024 adanya pembelian satu unit ekokardiografi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di poli

jantung. Berikut adalah rincian pembelian belanja modal peralatan dan mesin Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes TA 2024:

Tabel B.5.1
Rincian pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk Periode 31 Desember 2024

URAIAN	Vol	JUMLAH BIAYA
<i>Pengadaan Alat Kesehatan</i>		
Kacamata Radiasi	1	2.650.000
Tabir Pelindung	1	22.000.000
TLD Badge	2	5.800.000
Dehumidifier	1	3.500.000
Echocardiography (ECHO)	1	2.523.000.000
<i>Pengadaan Perangkat Pengolah Data</i>		
Personal Computer	3	61.755.000
Printer	1	3.441.000
Laptop	1	18.500.000
Handpohone	1	19.000.000
Jumlah		2.659.646.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

C.1 Aset Lancar

Rp

*2.144.576.555
,00*

Jumlah Aset Lancar Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 2.144.576.555,00 dan Rp 1.829.115.392,00. Terdapat kenaikan sebesar 17,25% atau sebesar Rp 315.461.163,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Bukan

C.1.1 Piutang Bukan Pajak

Pajak

Rp

6.057.800,00

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 6.057.800,00 dan Rp1.465.600,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 4.569.238,00 dengan persentase 313,33%. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNBPN pada Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes merupakan piutang atas klaim BPJS atas pelayanan November 2024 dengan BAHV no 12228/BA/IV-02/1224 tanggal 27 Desember 2024 senilai Rp 3.486.900,00 dan BAHV Desember 674/BA/IV-02/0125 tanggal 30 Januari 2025 senilai Rp 2.570.900,00 Rincian Piutang PNBPN disajikan sebagai berikut:

**Tabel C.1.1
Rincian Piutang PNBPN**

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang PNBPN			
BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)	6.057.800	1.465.600	4.592.200
Jumlah	6.057.800	1.465.600	2.021.300

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak (Rp
30.290,00)

C.1.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp 30.290,00) dan (Rp7.328,00) terdapat kenaikan sebesar (Rp 22.962,00) atau 313.35 %, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.1.2
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	6.057.800	0.5%	30.290
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.057.800		30.290

Piutang Bukan
Pajak (Netto)
Rp
6.027.510,00

C.1.3 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Nilai Piutang Bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 6.027.510,00 dan Rp1.458.272,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 4.569.238,00 atau sebesar 313,33%.

Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto) sebagaimana terlampir.

Tabel C.1.3
Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto) Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Nilai Piutang (Netto)
Piutang Bukan Pajak (Netto)			
Lancar	6.057.800	(30.290)	6.027.510
Jumlah	6.057.800	(30.290)	6.027.510

C.1.4 Persediaan

Persediaan Rp
2.138.549.045
,00

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan / atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 2.138.549.045,00 dan Rp 1.827.657.120,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. C.1.4
Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Jenis	2024	2023
Barang Konsumsi	324.854.929	266.358.234
Bahan untuk pemeliharaan	18.518.065	11.497.034
Suku Cadang	54.161.726	50.959.217
Bahan Baku	1.193.276.406	978.425.615
Persediaan lainnya	547.737.919	543.643.562
Jumlah	2.138.549.045	1.827.657.120

Aset Tetap Rp
3.530.024.019
,00

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 3.530.024.019,00 dan Rp 2.303.880.828,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap UPK Kemenkes berupa Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan
Mesin
Rp25.735.964.
174,00

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 25.735.964.174,00 dan Rp 25.235.752.022,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. C.2.1
Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo awal nilai Perolehan per 31 Desember 2023	25.235.752.022
Mutasi Tambah:	
Pembelian	2.659.646.000
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	2.159.433.848
Saldo per 31 Desember 2024	25.735.964.174
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	22.205.940.155
Nilai Buku per 31 Desember 2024	3.530.024.019

Terdapat mutasi tambah sebesar Rp 2.659.646.000,00 yakni pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp 2.659.646.000,00 yang terdiri dari :

Tabel. C.6.1
Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2024

URAIAN	Vol	JUMLAH BIAYA
Pengadaan Alat Kesehatan		
Kacamata Radiasi	1	2.650.000
Tabir Pelindung Radiasi	1	22.000.000
TLD Badge	2	5.800.000
Dehumidifier	1	3.500.000
Echocardiography (ECHO)	1	2.523.000.000
Pengadaan Perangkat Pengolah Data		
Personal Komputer	3	61.755.000
Printer	1	3.441.000
Laptop	1	18.500.000
Handphone	1	19.000.000
Jumlah		2.659.646.000

Pembelian alat ini merupakan pengadaan 6 unit alat kesehatan dan pengadaan 6 unit perangkat pengolah data.

Terdapat mutasi kurang sebesar Rp2.159.433.848,00 yakni reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya yang merupakan alat angkutan darat bermotor, alat kedokteran, komputer unit dan peralatan komputer.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp22.205.940.150,00)*

C.2.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp 22.205.940.155,00) dan (Rp 22.931.871.194,00) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 merupakan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin.

*Aset Lainnya
(Rp
6.415.625,00
)*

C.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 6.415.625,00 dan Rp 66.581.250,00. Terjadi penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp 60.165.625,00) atau sebesar (90,36%)

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset lainnya terdiri dari aset tak terwujud dan aset lain-lain.

*Aset Tak
Berwujud
Rp
1.001.960.000,00*

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah tetap sebesar Rp1.001.960.000 dan Rp1.001.960.000,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dapat berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi pada tahun 2023.

Tabel C.3.1
Rincian Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Tgl Perolehan	Nilai
1	Simklinik	09/12/2014	571.560.000
2	LIS (Sistem Informasi Laboratorium)	09/09/2020	192.000.000
3	Sipeluk	14/06/2021	94.500.000
4	Website UPK	29/10/2021	49.000.000
5	Pengembangan Simklinik	-	94.900.000
Jumlah			1.001.960.000

Aset Lain-lain

Rp

2.576.738.897
,00

C.3.2 Aset Lain – lain

Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah tetap sebesar Rp 2.576.738.897,00 dan Rp 417.305.049,00.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel C.3.2
Rincian Mutasi Aset Lain-lain

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	417.305.049
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	2.159.433.848
Mutasi Kurang:	
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2024	2.576.738.897

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan adalah dari Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes senilai Rp 2.159.433.848,00 berupa alat angkutan darat bermotor, alat kedokteran, komputer unit dan peralatan komputer.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp
3.572.283.272
,00)*

C.3.3 Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp 3.572.283.272,00) dan (Rp 1.352.683.799,00)

**Tabel. C.3.3
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya
TA 2024**

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
<i>Software</i>	<i>1.001.960.000</i>	<i>(995.835.000)</i>	<i>6.125.000</i>
Jumlah			
Aset Lain-lain			
Jumlah	<i>2.576.738.897</i>	<i>(2.576.448.272)</i>	<i>290.625</i>

*Ekuitas
Rp5.681.016.1
99,00*

C.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.681.016.199,00 dan 4.199.577.470,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp

665.068.271,0

0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp665.068.271,00 dan Rp610.462.829,00. pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel D.1
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

Akun	Keterangan	2024	2023	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan		76.715	(100,00)
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	554.957.271	499.711.677	11,06
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	32.484.000	16.235.100	100,00
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	77.627.000	94.258.000	(17,64)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		181.337	100,00
	Jumlah Total	665.068.271	610.462.829	8,52

Terdapat peningkatan cukup signifikan pada pendapatan dari badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan serta pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan yang disebabkan karena meningkatnya nilai kapitasi BPJS Kesehatan di UPK dibanding tahun 2023. Dan adanya pendapatan yang diterima oleh UPK Kemenkes yang berasal dari klaim BPJS pada klinik utama.

Beban Pegawai

Rp6.551.127.71

8,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.551.127.718,00 dan Rp6.104.310.750,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel. D.2
Perbandingan Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023

Akun	Uraian	2024	2023	%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.795.640.000	1.729.614.300	3,82
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	24.140	22.312	8,19
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	120.372.440	111.827.480	7,64
511122	Beban Tunj. Anak PNS	32.040.470	29.646.012	8,08
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	15.660.000	60,92
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	252.670.000	267.900.000	(5,68)
511125	Beban Tunj. PPh PNS	24.423.901	14.643.982	66,78
511126	Beban Tunj. Beras PNS	87.555.780	87.266.100	0,33
511129	Beban Uang Makan PNS	238.083.000	242.676.000	(1,89)
511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	27.600.000	27.600.000	-
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	5.109.850	8.970.000	(43,03)
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	182.360.800	41.531.000	339,10
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.761	1.113	237,92
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	9.266.000	1.483.250	524,71
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1.596.912	-	-
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	23.760.000	5.400.000	340,00
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	8.255.880	1.375.980	500,00
511628	Beban Uang Makan PPPK	28.668.000	7.992.000	258,71
512211	Beban Uang Lembur	263.538.000	122.625.000	114,91

512212	Beban Uang Lembur PPPK	31.899.000	3.804.000	738,56
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3.128.990.961	3.321.548.422	(5,80)
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	264.068.823	62.723.799	321,00
Jumlah Total		6.551.127.718	6.104.310.750	7,32

Terjadi peningkatan pada Beban Pegawai karena terdapat beberapa pegawai baru PPPK sebanyak 3 orang dan terdapat beberapa pegawai naik pangkat. Terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp 741.347 di akun 511151 sebesar Rp 740.150,00 dan 511119 sebesar Rp 1.197,00

*Beban
Persediaan
Rp2.567.997.4
43,00*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.567.997.443,00 dan Rp2.693.380.758,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel. D.3
Perbandingan Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 2023

Akun	URAIAN	2024	2023	%
593111	Beban Persediaan Konsumsi	236.553.096,	380.053.963,	(37,76)
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	1.163.399.111,	1.388.612.085,	(16,22)
593149	Beban Persediaan Lainnya	1.168.045.236,	924.714.710,	26,31
JUMLAH		2.567.997.443	2.693.380.758	(4,66)

Terdapat penurunan pemakaian persediaan karena pada tahun 2024 sudah mulai menghentikan pemeriksaan antigen dan SWAB PCR serta tidak mengadakan vaksin COVID-19.

Beban Barang dan Jasa
Rp1.498.484.803,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.498.484.803,00 dan Rp1.824.908.647,00. Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel D.4
Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 2023

AKUN	URAIAN	2024	2023	%
521111	Beban Keperluan Perkantoran	646.796.085,	732.229.861,	(11,67)
521113	Beban Penambahan Daya Tahan Tubuh	173.810.682,	175.391.877,	(0,90)
521115	Beban Honor Operasional Satker	96.040.000,	155.512.000,	(38,24)
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	261.713.036,	275.321.232,	(4,94)
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,	69.779.317,	(100,00)
521211	Beban Bahan	54.190.400,	107.047.500,	(49,38)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.900,	0,	-
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	21.611.700,	29.554.860,	(26,88)
522141	Beban Sewa	39.000.000,	80.280.000,	(51,42)
522151	Beban Jasa Profesi	50.400.000,	101.700.000,	(50,44)
522191	Beban Jasa Lainnya	154.920.000,	98.092.000,	57,93
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	1.498.484.803	1.824.908.647	(17,89)

Terdapat penurunan beban barang dan jasa terutama pada Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 sudah tidak ada

di tahun 2024. Selain itu terjadi penurunan pada seluruh beban barang dan jasa.

D.4.1 Beban Barang dan Jasa Penanganan Pandemi COVID-19

Tabel D.4.1
Rincian Beban Barang dan Jasa Penanganan Pandemi COVID-19
31 Desember 2024 dan 2023

AKUN	URAIAN	2024	2023	%
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	69.779.317,	(100,00)
	Jumlah	-	69.779.317	(100,00)

Pada tahun 2024 tidak ada beban barang operasional – Penanganan Pandemi COVID-19.

*Beban
Pemeliharaan
Rp1.452.127.4
01,00*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.452.127.401,00 dan Rp1.028.881.597,00. Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel D.5
Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 2023

AKUN	URAIAN	2024	2023	%
523121	Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	1.270.470.769,	957.812.321,	32,64
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	112.485.000,	0,	-
593113	Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	48.503.143,	48.951.090,	(0,92)
593114	Beban persediaan suku cadang	20.668.489,	22.118.186,	(6,55)
	JUMLAH	1.452.127.401	1.028.881.597	41,14

Terdapat peningkatan beban persediaan bahan untuk pemeliharaan yang disebabkan karena adanya peningkatan pemeliharaan

ambulans serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), beban pemeliharaan peralatan dan mesin dimana dapat digunakan untuk perbaikan alat laboratorium serta pemeliharaan sarana kantor untuk kebutuhan akreditasi klinik pratama UPK Kemenkes.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp984.404.45

0,00

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp984.404.450,00 dan Rp2.452.028.396,00. Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Berikut adalah rincian dari beban perjalanan dinas:

Tabel D.6
Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 2023

Akun	URAIAN	2024	2023	%
524111	Beban perjalanan biasa	561.998.450,	563.857.266,	(0,33)
524113	Beban Perjalanan dinas dalam kota	150.290.000,	189.810.000,	(20,82)
524114	Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota	27.430.000	267.540.000,	(89,75)
524119	Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota	244.686.000	1.430.821.130,	(82,90)
	JUMLAH	984.404.450	2.452.028.396	(59,85)

Terdapat penurunan sebesar Rp1.467.623.946,00 atau sebesar 59,85% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini disebabkan efisiensi perjalanan dinas Kementerian Kesehatan.

Beban

Penyusutan

Dan amortisasi

Rp

1.493.668.434

,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.493.668.434,00 dan Rp1.849.283.454,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi

penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel D.7
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

Akun	Uraian	2024	2023	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.433.502.809,	1.758.513.142,	(18,48)
592115	Beban amortisasi software	59.875.000,	83.875.000,	(28,61)
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam oprasional pemerintah	290.625,	145.312	100,00
	Jumlah	1.493.668.434	1.842.533.454	(18,93)

Secara umum beban penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan sebesar (Rp348.865.020,00) atau sebesar (18,93%) disebabkan karena secara umum usia aset telah mencapai umur ekonomis.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp30.290,00*

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp30.290,00 dan Rp7.328,00. Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban penyisihan atas piutang BPJS Klinik Utama Bakti Husada Kemenkes pada bulan pelayanan Desember 2024.

*Surplus/(Defisit)
dari kegiatan
non
operasional
lainnya
Rp(7.279.498,
00)*

D.10 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(7.279.498,00) dan Rp(9.227.303,00). Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Tabel D.8

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

Akun	URAIAN	2024	2023	%
425122	Pendapatan pelepasan aset non lancar	-	6.113.789	(100,00)
596121	Beban persediaan rusak/usang	7.279.498	15.341.092	(52,55)
	Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	(7.279.498)	(9.227.303)	(21,11)

Terdapat penurunan defisit kegiatan non operasional hal tersebut karena pada tahun 2024 terdapat beban kegiatan non operasional lainnya yang merupakan beban persediaan yang rusak/usang senilai Rp7.279.498,00.

Surplus/(Defisit) **D.10 Surplus/(Defisit) Laporan Operasional**

t) LO

Rp(13.890.051 Surplus/(Defisit) Laporan Operasional untuk periode yang berakhir
.766,00) 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(13.890.051.766,00) dan Rp(15.344.815.404,00).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp4.199.577.470,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.199.577.470,00 dan Rp6.084.355.308,00.

Surplus/Defisit
-LO
(Rp13.890.051.766,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp13.890.051.766,00) dan (Rp15.344.815.404,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Koreksi Lain-Lain
Rp7.328,00

E.3 Lain-Lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp7.328,00 dan Rp3.639,00. Koreksi tersebut merupakan koreksi atas beban penyisihan piutang tak tertagih bersaldo positif.

Koreksi Antar
Entitas
Rp15.371.483.167,00

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.371.483.167,00 dan Rp13.533.158.927,00. Transaksi antar adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel. E.5
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	16.053.307.848
Diterima Dari Entitas Lain	(660.473.171)
Transfer Keluar	(27.854.300)
Transfer Masuk	6.502.790
JUMLAH	15.371.483.167

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja yang melibatkan kas negara. Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar (Rp 660.473.171,00) sedangkan DKEL sebesar Rp16.053.307.848,00.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan anatar K/L dengan BUN.

Transfer masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 6.502.790,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. E.5.2.1
Rincian Transfer Masuk

Satker Pemberi	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
Direktorat Pengelola dan Pelayanan Kefarmasian	Paxlovid 150 mg/ 100 mg	5	paket	6.502.790
Nilai Total				6.502.790

Transfer keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 27.854.300,00 berupa Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dengan rincian:

Tabel. E.5.2
Rincian Transfer Keluar

Satker Penerima	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika)	Needle 26 Terumo	100	pcs	99.800
	VTM Aktif (Active VTM)	100	pcs	3.800.000
	Handsocon Steril No. 6,5 @50	8	box	1.840.000
	21 - Needle 23G @100 pcs Terumo	10	box	825.000
	21 - Needle L @100 pcs	49	box	7.007.000
		11	box	2.117.500
	Handsocon Steril No. 6,5 @100	6	box	6.000.000
	Handsocon Steril No. 7,5 @100	6	box	6.000.000
	21 - Needle 25G @100 pcs Onemed	6	box	165.000
Nilai Total				27.854.300

Koreksi Antar **E.6 Ekuitas Akhir**

Entitas

Rp5.681.016.1

99,00

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.681.016.199,00 dan Rp4.199.577.470,00.

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Capaian Output Strategis Lainnya

Selama periode Tahun Anggaran 2024 output strategis yang telah dicapai Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes sebagai berikut:

1. Alat Kesehatan memiliki output strategis berupa kacamata radiasi, tabir pelindung radiasi, TLD Badge, dehumidifier dan Echocardiography.
2. Obat-obatan dan BMHP memiliki output strategis berupa pengadaan obat-obatan, bahan medis habis pakai dan pengadaan reagen.
3. Perangkat Pengolah Data Dan Informasi memiliki output strategis berupa pengadaan personal computer, printer, laptop dan handphone.
4. Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU memiliki output strategis berupa:
 - Biaya langganan limbah
 - Pemeliharaan alat kesehatan
 - Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
 - Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
 - Pengisian tabung oksigen
 - Kalibrasi
5. Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer memiliki output strategis berupa:
 - Pemeliharaan Laboratorium Information System (LIS)
 - Pemeliharaan Aplikasi SIM GOS
6. Layanan Umum memiliki output strategis berupa:
 - Konsumsi medical check up di upk
 - Transportasi lokal
 - Layanan dukungan kesehatan/administrasi
 - Biaya survei akreditasi
 - Persiapan wbk wbbm upk kemenkes
 - Pertemuan penyusutan arsip upk kemenkes
 - Rapat LP/LS
7. Layanan Sarana Internal memiliki output strategis berupa sewa kendaraan operasional kantor.
8. Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal memiliki output strategis berupa :
 - Prolanis
 - Kelas Edukasi
 - Pelatihan Pegawai UPK
9. Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal memiliki output strategis berupa Pemantauan dan Evaluasi UPK Kemenkes
10. Layanan Perkantoran memiliki output strategis berupa:
 - Belanja gaji dan tunjangan
 - Operasional dan pemeliharaan kantor

Secara rinci output strategis Tahun Anggaran 2024, dapat disampaikan dalam tabel di bawah ini:

Kode Output Startegis	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Presentasi Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
015404	Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI	16.379.405.000	16.053.307.848	98,01			
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
CAB.002	Alat Kesehatan	2.557.356.000	5.153.086.010	99,80	6	6	100
CAB.003	Obat-obatan dan BMHP	2.605.988.000	2.596.136.010	99,62	13	13	100
CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	102.696.000	102.696.000	100	6	6	100
CCB.002	Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU	991.838.000	967.035.838	97,50	140	140	100
CCL.001	Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer	112.486.000	112.485.000	100	4	4	100
EBA.962	Layanan Umum	223.612.000	222.706.700	99,60	1	1	100
EBB.951	Layanan Sarana Internal	39.000.000	39.000.000	100	1	1	100
EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	96.650.000	95.825.700	99,15	60	60	100
FAE.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal	158.624.000	155.024.000	97,73	1	1	100
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
EBA.994	Layanan Perkantoran	9,491,155,000	9.206.189.947	97,16	2	2	100